

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **PERATURAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155).

Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 368, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5642).

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5).

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33).

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 601).

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Perhubungan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815).

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Perdagangan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492).

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184).

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593).

## **BUKU, JURNAL, DAN DOKUMEN RESMI**

Aisah, Nur, 2019. *“Evaluasi efisiensi dan efektivitas pengadaan obat dan prosedur katalog elektronik (E-Catalogue) di Dinas Kesehatan Kabupaten Pati”*, Tesis, Magister Ilmu Farmasi, Universitas Gadjah Mada.

Arsana, I Putu Jati 2016. *“Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”*. Depublish, Sleman.

Basing, Martin,. 2016. *“The Contemporary Law Dictionary (Kamus Hukum Kontemporer)”*. PT. Gramdeia Pustaka Utama, Jakarta.

Latif, Y, 2012. *“Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas, dan Aktualitas Pancasila”*. Gramedia, Jakarta.

Marzuki Yahya dan Endah Fitri Susanti, 2012. *“Buku Pintar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”*. Niaga Swadaya, Jakarta.

- Muta ali, Fathan, 2020. “*Analisis prosedur pangadaan barang/jasa long range identification and tracking of ships (LRIT) ditinjau dari prinsip adil dan bersaing*”. Tesis, Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada.
- Nugroho, Susanti Adi, 2012. “*Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*”. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Purwosusilo, 2017. “*Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*”. Kencana, Jakarta.
- Rokan, Mustafa Kamal, 2010. “*Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*”. Raja Grafindo, Jakarta,
- Safrina dan Susiana, 2013. “*Perlindungan Usaha Kecil dan Menengah dalam Undang-Undang Persaingan Usaha*”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 61, Th. XV.
- Saija, Ronald, 2015. “*Dimensi Hukum Pengadaan Barang/Jasa*”, Deepublish Publisher, Yogyakarta.
- Sanjaya Denny et al. 2013. “*Analisis Yuridis Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Tanjung Balai Ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*”. Jurnal Hukum Ekonomi, Volume I Nomor 2.
- Suherman, Ade Maman, 2010. “*Pengadaan Barang dan Jasa (Government Procurement) Perspektif Kompetisi, Kebijakan Ekonomi, dan Hukum Perdagangan International*”. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Suprianto Ali, Yosef Koton, 2022. “*Mal Aministrasi dalam proses tender pengadaan barang dan jasa*”. Deepublish, Yogyakarta.
- Sutedi, Adrian, 2009. “*Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*”. Sinar Grafika, Jakarta.
- Wibowo, Richo Andi, 2021. “*Kontrak Pemerintah; Konsep, Ragam, Perkembangan Regulasi, dan Kebijakan Putusan*”. Kencana, Jakarta.<sup>1</sup>

*Pemerintah Pendekatan Perbandingan Hukum"*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

## MEDIA DAN/ATAU WEBSITE

Aurel Oktavira, Bernadetha. 2023. *"Tahapan Pelaksanaan Tender Pemerintah Indonesia"*. Pada

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/tahapan-pelaksanaan-tender-pemerintah-indonesia-lt618b6bd625cdb/> diakses pada 28 Juli 2023.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. *"Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Apakah*

*Harus Dipedomani?"*, <https://bppk.kemenkeu.go.id/balai-diklat-keuangan-malang/artikel/artikel-prinsip-prinsip-pengadaan-barangjasa-apakah-harus-dipedomani-016149> diakses 23 Juli 2023

Data Indonesia. 3 Februari 2023. *"Jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia"*.

<https://dataindonesia.id/internet/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-sebanyak-167-juta-pada-2023> diakses pada tanggal 22 September 2023.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yeni Ratna Pratiwi. *"Peran Media Sosial Pada*

*Intasnsi Pemerintah"* <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-banjarmasin/baca-artikel/14257/Peran-Media-Sosial-Pada-Instansi-Pemerintah.html>. Diakses pada 25 September 2023.

LKPP. Katalog Elektronik. *"Pencarian Jasa Lainnya : Pengelolaan Media Sosial. E-catalogue*

*LKPP RI."* <https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/76880074?lang=id&type=regency> diakses 20 Mei 2024.

LPKN. 2024. *"Pentingnya Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang Jasa dan Manfaatnya"*.

Diakses melalui <https://pengadaan.or.id/2024/01/31/pentingnya-sertifikasi-kompetensi-pengadaan-barang-jasa-dan-manfaatnya/> pada 19 Mei 2024.

*Sosial Internasional"*. Tersedia pada

<https://lpse.kemenparekraf.go.id/eproc4/lelang/5178386/pengumumanlelang> terakhir

diakses 8 Mei 2024.

LPSE Kementerian Perhubungan. *"Informasi Tender Penyusunan Linimasa di Media Sosial"*.

<https://lpse.dephub.go.id/eproc4/lelang/79306114/pengumumanlelang>, diakses tanggal 23

Juli 2023.

LPSE Kementerian Perhubungan.

<https://lpse.dephub.go.id/eproc4/nontender/91293114/pengumumanpl> diakses tanggal 28

Juli 2023

Soekanto, Soerdjono, 2015. *"Pengantar Penelitian Hukum"*. Universitas Indonesia, Jakarta.

Sugiyono, 2016. *"Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D"*. Alfabeta, Bandung.

Sumardjono Maria SW., 2021, *"Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum"*. Universitas Gadjah Mada.

Susriyanto. LKPN. *"Rekayasa Pemecahan Paket Pekerjaan Diduga Kesampingkan Perpres 16*

*Tahun 2018"*. Pada <https://ilmu.lpkn.id/2021/02/25/rekayasa-pemecahan-paket-pekerjaan-diduga-kesampingkan-perpres-16-tahun-2018/>.

UGM. Luknanto. Djoko. *"Strategi dan Motivasi Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang*

*dan Jasa Pemerintah."* <https://luk.staff.ugm.ac.id>, diakses pada 27 Juli 2023.